

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah membawa dampak yang sangat luas terhadap berkembangnya demokrasi di Indonesia, dan membawa harapan besar untuk kesejahteraan rakyat serta kemakmuran daerah dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Rakyat bisa menentukan pilihannya sendiri dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya yang dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini membawa perubahan pandangan masyarakat terhadap pemerintahan, karena calon yang akan memimpin dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini membuktikan adanya sikap demokratis dan ketransparanan bagi rakyat yang akan memilih seorang pemimpin secara terbuka. Bagaimanapun ini merupakan konsekuensi logis dari berlakunya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.(Rosidin 2010 : 85).

Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut rakyat berharap dapat mengetahui dan memahami isi yang terkandung dalam Undang-Undang, sehingga lebih meningkatkan pengetahuan serta wawasan politik masyarakat. Seperti yang tercantum dalam pasal 56 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

“ Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (1), pasangan calon yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik (2)”

Seperti yang yang tercantum dalam undang-undang nomor 12 tahun 2008 pasal 59 ayat 6 yang berbunyi :

“ Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mngusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya”.

Dari penjelasan semua pasal diatas dapat disimpulkan bahwa, pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis tetapi masih kentalnya keterlibatan partai dalam menentukan dan mengendalikan pemilihan kepala daerah, secara pemilihan demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil bahwa pemilihan kepala daerah benar-benar bersifat murni dan konsekuen dimana setiap pasangan calon tersebut diajukan oleh partai politik. Harapan positif dari partai politik adalah optimalisasi fungsi dan peran partai politik itu sendiri dalam membawa masyarakat menuju kearah yang lebih baik dan sejahtera serta demokratis.

Dengan demikian bahwa partai politik memegang peranan strategis dan penting demi terlaksananya Pemilihan Kepala Daerah. Pentingnya peran partai politik dalam kedudukan politik, Untuk mendapat kekuasaan dalam suatu pemerintahan yang akan mewarnai kebijakan-kebijakan politik dari partai yang bersangkutan. Pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana terpenting dalam tiap Negara Demokrasi , terlebih lagi bagi Negara yang berbentuk Republik seperti Indonesia, Pemilihan Kepala Daerah juga merupakan salah satu sarana pendidikan politik bagi masyarakat yang bersifat langsung dan terbuka. Sehingga diharapkan

dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Demokrasi. (Rosidin 2010 : 112).

Tetapi kenyataannya dengan adanya keterlibatan partai politik kebebasan masyarakat untuk berdemokrasi yang selayaknya tidak berjalan seperti harapan pemerintah, inilah yang menjadi faktor dan alasan mengapa masyarakat lebih memilih GOLPUT dari pada datang ke TPS untuk memberikan suara pada pemilihan kepala daerah.

Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih golput dari pada datang ke TPS untuk memberikan suara pada pemilihan kepala daerah.

Pertama, faktor Tekhnis maksudnya adalah adanya kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih. Seperti pada saat hari pencoblosan pemilih sedang sakit, pemilih sedang ada kegiatan yang lain serta berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih. Kondisi itulah yang secara teknis membuat pemilih tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. *Kedua*, faktor pekerjaan adalah pekerjaan sehari-hari pemilih. Faktor pekerjaan pemilih ini memiliki kontribusi terhadap jumlah orang yang tidak memilih. *Ketiga*, faktor administratif adalah faktor yang berkaitan dengan aspek adminstrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang membuat pemilih tidak bisa ikut

dalam pemilihan. Pemilih tidak akan bisa menggunakan hak pilih jika tidak terdaftar sebagai pemilih. Kasus pemilu legislatif 2009 adalah buktinya banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak bisa ikut dalam pemilu karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Jika kondisi yang seperti ini terjadi maka secara otomatis masyarakat akan tergabung kedalam kategori golput. *Keempat*, sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Hal ini disebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur pemilu legislatif dan pemilu presiden hal ini belum dimasukkan pemilihan yang lebih kecil RT/ RW.

Kondisi lain yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda. Kelima, faktor politik adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidak percaya dengan partai, tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Stigma politik itu kotor, jahat, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap politik sehingga membuat masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilih. Stigma ini terbentuk karena tabiat sebagian politisi yang masuk pada kategori politik instan. Politik dimana baru mendekati masyarakat ketika akan ada agenda politik seperti pemilu. Maka kondisi ini meruntuhkan

kepercayaan masyarakat pada politisi. (Tauchid Dwijayanto 2011 : Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan).

Di Indonesia terdapat dua kelompok golput *pertama*, adalah kelompok golput awam. Yaitu mereka yang tidak mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, tetapi karena alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok ini tidak sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya sampai tingkat deskriptif saja.

Kedua, adalah kelompok golput pilihan. Yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai politik yang ada. Atau karena mereka menginginkan adanya satu organisasi politik lain yang sekarang belum ada. Maupun karena mereka mengkehendaki pemilu atas dasar sistem distrik, dan berbagai alasan lainnya. Kemampuan analisis politik mereka jauh lebih tinggi dibandingkan golput awam. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik yang tidak Cuma berada pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat evaluasi (Tauchid Dwijayanto 2011 : 53).

Di Kecamatan Atinggola sendiri memiliki jumlah penduduk 10.923 jiwa terdiri dari perempuan 5.431 dan laki-laki 5.492 jiwa. Jumlah pemilih 7.761 jiwa yakni perempuan 3.846 dan laki-laki 3.915. dan Jumlah masyarakat yang tidak ikut memilih adalah 1.565 jiwa. Dari jumlah tersebut diperkirakan angka golput di Kecamatan Atinggola ada 20% dari jumlah pemilih. (Panwascam Kecamatan Atinggola).

Sekalipun angka golput hanya sekian persen dari jumlah pemilih, namun dengan jumlah itu tidak efektif porsi antara hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara Indonesia yang baik, dalam perkembangan politik dan masa depan bangsa. Sehingga dikhawatirkan fenomena ini sekalipun pada radius wilayah kecil di Kecamatan Atinggola akan berimplikasi pada warga masyarakat lain, dalam arti jika fenomena ini dibiarkan akan menjadi benih-benih kurang produktif bagi perkembangan demokrasi dan perkembangan politik secara universal di tanah air ini.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang akan di tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **Golongan Putih (Golput) Pada Pemilihan Kepala Daerah di Gorontalo Utara (Studi Kasus Bagi Warga Pemilih di Kecamatan Atinggola).**

1.2 Rumusan Masalah

Pada hakekatnya masalah dalam suatu penelitian merupakan segala bentuk pernyataan yang perlu dicari jawabannya, atau segala bentuk kesulitan yang datang tentunya harus ada kegiatan yang memecahkannya sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Adapun rumusan permasalahan yang penulis ajukan adalah:

1. Bagaimanakah perkembangan munculnya golput bagi warga Atinggola dalam Pemilihan Kepala daerah di Kabupaten Gorontalo Utara ?

2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan masyarakat atinggola lebih memilih golput dari pada datang ke TPS untuk memberikan suaranya dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gorontalo Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui dan menganalisis tingkat perkembangan munculnya golput bagi warga Atinggola dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara
2. Ingin mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih golput dari pada datang ke TPS untuk memberikan suaranya dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gorontalo Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

a. Manfaat Akademis

Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai golongan putih yang terjadi di Kecamatan Atinggola pada Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Gorontalo utara 2013 yang baru-baru ini dilaksanakan.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai masukan bagi pemerintah Kecamatan Atinggola dalam hal ini Panwascam Kecamatan Atinggola. Untuk mengantisipasi golput atau dapat menekan angka golput itu sendiri.
2. Sebagai tambahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis.